

**Ideologi Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta
(Jalan Tengah Teori Merkantilisme Liberalisme dan Marxisme)****Syaiful Bahri**Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
syaiful1998@gmail.com**Abstrak**

Mohammad Hatta hidup dan berkembang pendidikannya mulai dari lingkungan keluarga yang religius hingga lingkungan pendidikan yang mendunia. Pendidikan tinggi diperoleh dari jurusan ekonomi kenegaraan Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda. Proses pendidikan di Belanda berimbas dalam perannya pada pemikiran teori ekonomi merkantilisme, liberalisme, dan marxisme di Indonesia. Untuk itu tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemikiran dan gerakan keilmuan Mohammad Hatta. Penelitian menggunakan metode *library research* yaitu metode penelitian berbasis kritis yang bersandar pada analisa dan sintesa terhadap data kepustakaan. Langkah penelitian yaitu mencari, memilah, dan menemukan kesenjangan. Data dikumpulkan menggunakan alat bantu bibliographi berupa artikel jurnal dan informasi web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh Mohammad Hatta berlandaskan teori Merkantilisme yang berbasis penguasa kerajaan tradisional. Teori Marxisme digunakan sebagai alat penggerak teori Merkantilisme sehingga berbaur dengan kepentingan rakyat. Teori Liberalisme digunakan sebagai keperpihakan negara kepada rakyat untuk bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akhirnya, praktik ekonomi kerakyatan merupakan pilihan /gaya menengahi ketiga teori besar tersebut. Bentuk implementasi ekonomi kerakyatan yaitu koperasi. Rakyat bisa bekerja sama melalui koperasi atas asas kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ekonomi kerakyatan menjadi ekonomi Pancasila dengan adanya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Keywords: Mohammad Hatta, koperasi, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, jalan tengah

Abstract

Mohammad Hatta lived and developed his education from a religious family environment to a world-class educational environment. His higher education was obtained from the state economics department at the Higher School of Economics in Rotterdam, the Netherlands. The educational process in the Netherlands had an impact on the economic theory of Mercantilism, Liberalism and Marxism in Indonesia. For this reason, the aim of the research was to determine the role of Mohammad Hatta's thoughts and scientific movements. The research used the library research method, namely a critical-based research method that relies on analysis and synthesis of library data. The research steps were searching, sorting and finding gaps. Data was collected using bibliographic tools in the form of journal articles and web information. The research results showed that the people's economy built by Mohammad Hatta was based on the theory of Mercantilism based on traditional royal rulers. The theory of Marxism was used as a tool to drive the theory of Mercantilism so that it blended with the interests of the people. Liberalism theory was used as the state's support for the people to work according to their respective abilities. Finally, people's economic practices were a choice/style of mediating the three major theories. The form of implementation of the people's economy was cooperatives. People can work together through cooperatives on the principle of kinship to achieve social welfare. The people's

economy became the Pancasila economy with the existence of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Mohammad Hatta, cooperatives, people's economy, Pancasila economy, moderation*

Informasi Artikel:

Diterima: Oktober 2023 Direvisi November 2023 Diterbitkan Desember 2023

PENDAHULUAN

Dunia mengalami perkembangan jaman dari masa ke masa. Sejak masa kerajaan atau pada abad ke-16 kerajaan-kerajaan di Eropa telah melakukan ekspansi kekuasaannya. Akibat ekspansi ini muncul hubungan antar bangsa bahkan antar kerajaan atau antar negara. Ekspansi bangsa Eropa bukan saja membawa kolonialisme, tetapi juga membawa misi penyebaran berbagai teori ekonomi. Masa modern telah menunjukkan berbagai teori ekonomi dari Eropa, misalnya merkantilisme, liberalisme, dan marxisme. Ketiga teori tersebut umumnya saling bertentangan, baik di negara asalnya maupun di negara kolonial atau negara bekas jajahan untuk saat ini. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menyampaikan isu-isu pemikiran yang menengahi ketiga teori ekonomi Eropa tersebut. Misalnya, teori ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh Mohammad Hatta. Teori ekonomi Mohammad Hatta bertujuan agar teori bisa bergerak secara bijaksana, adil, dan untuk kesejahteraan rakyat secara bersama bukan saling bertentangan atau bersaing. Pemikiran Mohammad Hatta dibutuhkan oleh masa lalu juga oleh masa kini karena berbasis rakyat. Rakyat adalah bagian entitas negara yang abadi, dan sebagai syarat berdirinya suatu negara.

Ketiga teori ekonomi Eropa tersebut sudah lama diamati oleh Mohammad Hatta, terutama saat beliau menempuh Pendidikan di Belanda. Ketiga teori ekonomi Eropa tersebut diawali dari sejarah ekspansi dan kolonialisme. Ekspansi Portugis sampai di Selat Malaka pada abad ke-16 yang dipimpin oleh *Alfonso de' Albuquerque* (1511), Spanyol sampai di Maluku yang dipimpin oleh *Sebastian d' Elacano* (1521), dan pada tahun 1596 ekspedisi Belanda yang dipimpin *Cornelis de Houtman* sampai di nusantara lewat pelabuhan di Banten. Kemudian berlanjut berdirinya *Veredigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) atau Persekutuan Perusahaan Hindia Timur pada tahun 1602. Berdirinya VOC didukung oleh parlemen kerajaan Belanda (. Aman 2014). Permasalahan internal seperti halnya korupsi, maka VOC mengalami kemunduran sehingga pada tahun 1800-an VOC dibubarkan diganti oleh pemerintahan perwakilan Kerajaan Belanda di nusantara atau Hindia Belanda (Aman, 2014).

Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia merupakan efek dari perkembangan teori ekonomi merkantilisme. Merkantilisme yaitu suatu teori ekonomi yang bertujuan untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya sebagai standar kekuasaan dan kekayaan suatu negara (Aman, 2014). Merkantilisme

menjadi dasar pemikiran kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mengejar kekayaan sebanyak-banyaknya lewat cara menguasai daerah-daerah jajahan. Daerah jajahan dipaksa untuk memproduksi berbagai produk yang dibutuhkan di pasar internasional Eropa, seperti rempah-rempah, kopi, dan lainnya.

Periode Merkantilisme yaitu masa tahun 1500 hingga 1750 atau abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Merkantilisme dikritik oleh liberalisme pada abad ke-18 dimulai secara massif pada era *Renaissance* pada tahun 1789. Kritik dilanjutkan lagi oleh Marxisme sekitar abad ke-19. Merkantilisme, liberalisme, dan marxisme menjadi teori ekonomi yang dilakukan oleh Eropa dan disebarkan ke negara-negara kolonialnya atau negara luar Eropa. Meskipun merkantilisme dikritik oleh liberalisme kemudian marxisme, tidak serta merta hilang. Hal ini dikarenakan masih ada kerajaan-kerajaan yang mempraktikkannya. Sebagai contoh Belanda masih melakukan praktek merkantilisme di nusantara dari politik tanam paksa hingga politik etis. Politik etis ini yang kemudian membuat para bangsawan nusantara berhasil memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan modern ke negeri Belanda.

Salah satu tokoh yang mendapatkan kesempatan manfaat dari praktik politik etis

Belanda tahun 1901 yaitu Mohammad Hatta. Mohammad Hatta adalah seorang intelektual nusantara yang lahir di Bukittinggi Sumatera Barat 12 Agustus 1902 (Maryono 2015), dari keluarga Islam yang memegang teguh nilai-nilai religinya. Melaksanakan pendidikan tingginya di Belanda, sehingga teori-teori ekonomi dari Eropa dikuasai dengan baik. Di luar pendidikan formalnya, Mohammad Hatta menjadi anggota sekaligus ketua di *non-government organisation* (NGO) bernama Perhimpunan Indonesia. Di organisasi itu beliau mengenal teori ekonomi marxisme, karena banyak anggota organisasi tersebut yang beraliran marxisme, sedangkan dia tidak seialiran dengan kebanyakan anggota Perhimpunan Indonesia. Berkaitan dengan teori besar ekonomi yang dipelajari dari Eropa, bagaimana peran keilmuan Mohammad Hatta terhadap ketiga aliran ekonomi tersebut?

METODOLOGI PENELITIAN

Terkait dengan peran keilmuan Mohammad Hatta terhadap relasi tiga teori ekonomi besar, merkantilisme, liberalisme, dan marxisme tentunya membutuhkan jawaban. Jawaban tersebut didapatkan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian. Tulisan ini menerapkan pendekatan atau metode penelitian *library research*. *Library research* bisa dikatakan

mirip dengan penelitian kualitatif. Peneliti menganggap penelitian kualitatif mirip dengan *library research*. Kesamaan atau kemiripan muncul pada teknik pengumpulan data kualitatif yang bisa menggunakan data teknik dokumentasi. Pada *library research* juga menggunakan data mirip dokumen tetapi lebih menjurus kepada kajian-kajian sedangkan dokumentasi masuk pada indeks dalam alat bantu bibliografi. Obyek penelitian *library research* bersifat alamiah namun berbentuk data olah atau informasi. Kalau obyek penelitian kualitatif berbentuk data alamiah juga tanpa adanya *treatment* dan perlakuan. Hal ini dikarenakan lingkungan penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik. Model naturalistik membiarkan obyek bersifat apa adanya tanpa campur tangan dan perilaku dari peneliti. Data penelitiannya bersifat kualitatif yang mengutamakan data non-angka (Sugiyono, 2011).

Metode penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang berbasis pada analisis dan sintesa untuk menemukan hal baru atau hal yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan tema Pemikiran Mohammad Hatta. Langkah penelitian ini melalui cara *searching*, *reading*, *analyzing*, sintesa, dan menguraikan data penelitian (Sugiyanto dkk, 2022).

Data penelitian berasal dari indeks jurnal, buku teks, dan informasi web. Kelebihan metode penelitian kepustakaan yaitu menghemat waktu dan biaya. Model Analisa bersifat deskriptif dan reflektif. Analisa deskriptif yaitu menggambarkan data dan hasil penelitian dalam unit-unit analisa. Analisa reflektif adalah menguraikan data dan hasil penelitian sesuai intepretasi atau pemaknaan penulis (Zed, 2023). Tindakan deskriptif dan reflektif terhadap data dan hasil penelitian terkait. Dalam *library research* sumber data didapatkan dari data sekunder yang sudah tercantum dalam dunia digital. Data bisa berupa artikel jurnal dan informasi web yang telah diinformasikan dalam lingkungan digital (internet).

Analisa dilakukan secara deskriptif terhadap intepretasi data yang sudah dikumpulkan dan dipilah-pilah berdasarkan unit analisa (Prihatinah dkk,2023). Analisa juga dilakukan secara reflektif sesuai kemampuan penafsiran peneliti terhadap data yang didapatkan. Unit-unit Analisa lalu dilakukan sintesa untuk menyusun secara sistematis dan diuraikan sesuai dengan harapan hasil penelitian. Hasil penelitian dijadikan basis membuat kesimpulan. Kesimpulan disusun sesuai poin-poin penting yang telah didapatkan dan sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas tentang peran Mohammad Hatta terhadap perkembangan teori ekonomi merkantilisme, liberalisme, dan marxisme terlebih dahulu diuraikan tentang riwayat Mohammad Hatta dan riwayat pendidikannya. Selanjutnya dibahas tentang peran keilmuan Mohammad Hatta terhadap fenomena merkantilisme, liberalisme, dan marxisme. Peran tersebut kemudian diejawantahkan dalam praktek ekonomi kerakyatan yang diproteksi oleh ekonomi Pancasila.

Religiusitas Mohammad Hatta

Politik etis diadakan pada tahun 1901 membawa misi pendidikan bagi rakyat pribumi. Dua misi lainnya yaitu imigrasi dan emigrasi atau transmigrasi. Politik etis diadakan berdasarkan usulan dari seorang pebisnis media Pieter Broosoof dan tokoh parlement bernama Van Deventer. Satu tahun sesudah penetapan politik etis, yaitu pada tahun 1902 lahirlah Mohammad Hatta di Bukittinggi Sumatera Barat dari keluarga muslim yang taat. Beliau adalah seorang cucu dari ulama besar jaringan Naqsabandiyah Minangkabau bernama Syeh Abdul Rohman. Surau kakeknya menjadi pusat pembelajaran Islam saat itu. Beliau pernah berguru agama kepada dua

ulama besar di Minangkabau bernama Syeh Muhammad Djamiel Djambek dan Haji Abdullah Ahmad. Dari keturunan dan lingkungan Islami inilah Mohammad Hatta memperoleh pengajaran, tempaan, dan jiwa priyayi santri yang amat taat kepada agamanya. Masa kecil sampai dengan pemuda mengenal ilmu agama, ilmu modern, dan ilmu tradisi kesukuannya, bahkan Schulte Nordholt pun mengakui perpaduan keilmuan ini. Mohammad Hatta tetap dalam kondisi yang sholeh meskipun menyanggah gelar politik dan ekonomi yang tinggi dalam kancah modern (Fuady, 2019).

Dengan keilmuan agama yang dimiliki, maka Mohammad Hatta mengemban setiap kompetensi ekonomi dan politiknya bernafaskan religi. Cara pandang dan perjuangannya dalam membina rakyat Indonesia tetap konsisten, terutama dalam hal menjembatani pemikiran asing dengan pribumi. Sifat religious yang khas ini membuatnya bersikap moderat dan mendidik yaitu mensinergikan teori ekonomi asing yang modern dengan karakter pribumi yang tradisional dan religius. Sikap moderat ini ditunjukkan sebagai sikap keterkaitan agama dengan negara. Menurutnya walaupun Indonesia bukan negara Islam, nilai dan normanya dapat diperjuangkan

lewat perwakilan rakyat atau lembaga legislatif (Fuady, 2019).

Pemahaman Mohammada Hatta yang tinggi terhadap religinya membawa dampak kepada masyarakat nusantara yang mayoritas Islam menerima pemikiran ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta diyakini masyarakat pasti tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sebagai jembatan antara negara dan rakyat yang diakui dalil-dalil religi Mohammad Hatta. Model menjembatani negara dan rakyat kemudian berdampak kepada penerimaan masyarakat modern yang berpegang pada negara demokrasi. Negara demokrasi mempunyai prinsip konsensus dan partisipasi rakyat sehingga perspektif teori mana pun di dunia pasti menerima teori ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta.

Pendidikan Mohammad Hatta

Pendidikan adalah sarana mengembangkan jiwa rakyat Indonesia. Pada usia 14 tahun tepatnya pada tahun 1916 Mohammad Hatta menyelesaikan pendidikannya di *Europese Legere School* (ELS). Pada tahun 1919, lulus dari sekolah *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) di Padang (Fuady 2019). Setelah lulus dari MULO, Mohammad Hatta melanjutkan pendidikannya ke sekolah

menengah atas pada jurusan dagang di *Prins Hendrikschool* (Utomo 2018) dan lulus tahun 1921. Kemudian melanjutkan Pendidikan tingginya di *Handels Hoogere School* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, Belanda. Ia lulus dari jurusan ekonomi kenegaraan dengan gelar sarjana ekonomi pada tahun 1932 (Maryono 2015).

Dari pendidikan di Rotterdam itulah, beliau mengenal berbagai teori ekonomi. Dari teori merkantilisme hingga liberal. Selain pendidikan formal, beliau juga mengikuti organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan menjadi ketua Perhimpunan Indonesia dari tahun 1926 sampai dengan 1931. Dalam organisasi Perhimpunan Indonesia inilah beliau memperoleh pengetahuan tentang marxisme. Anggota organisasi ini banyak yang menjadi pengikut pemikiran marxisme dan dekat dengan Semaun juga Stalin (Wikipedia n.d.).

Namun demikian, mengingat sifat moderat Mohammad Hatta yang religius, maka beliau tidak beraliran marxisme. Orang-orang Marxisme hanya menjadi teman dan ideologinya hanya menjadi teori ekonomi saja bukan sebagai ideologi pergerakan bagi Mohammad Hatta. Ini terbukti dengan gerakan Mohammad Hatta yang ketika kembali ke tanah air beliau menggunakan gerakan pendidikan untuk memerdekakan bangsanya bukan lewat

kekerasan. Melalui pendidikan, maka jalan menuju kemerdekaan sesuai dengan asas kedaulatan rakyat. Sebagai contoh beliau mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru (1933-1934) sebagai partai dengan gerakan mendidik rakyat terutama lewat tulisan di Daulat Ra'jat. PNI Baru berbeda dengan PNI yang dipimpin Soekarno (Maryono 2015).

Dilihat dari tipe kisah pendidikannya yang bersekolah tentang dagang di *Prins Hendrikschool* juga di *Handels Hoogere School* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam Belanda dalam jurusan ekonomi kenegaraan menampakkan bahwa Mohammad Hatta memahami teori ekonomi merkantilisme kerajaan Belanda masa Wilhelmina juga teori ekonomi liberal yang mulai berkembang di Eropa pasca Renaissance tahun 1789. Kemudian, ditambah pemahaman teori ekonomi marxisme. Tiga teori ekonomi tersebut membuat Mohammad Hatta semakin berpikir moderat untuk memerdekakan rakyat dengan strateginya pendidikan. Gerakan ekonominya berupa Pendidikan yang memoderasi tiga teori tersebut dalam wujud ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila, maka Mohammad Hatta menjadi tokoh religius juga ilmuwan ekonomi yang bersikap kolaboratif edukatif.

Jalan Tengah Terhadap Merkantilisme, Liberalisme, dan Marxisme

Merkantilisme dipraktekkan dan diajarkan di Eropa dari tahun 1500 sampai dengan 1750. Istilah merkantilisme berasal dari Bahasa Latin *merk* yang berarti komoditas atau produk dan *mercari* yang berarti melakukan barter atau mengadakan pertukaran. Istilah ini sebagai kesatuan makna teori ekonomi masa kerajaan absolut di Eropa yang kemudian disebut merkantilisme. Sebutan merkantilisme diperkenalkan oleh *Victo de Riqueti* dan *Maquis de Mirabeau* pada tahun 1763 dan Adam Smith pada tahun 1776 sebagai sebutan kinerja kerajaan yang menjajah (Rosyda n.d.).

Merkantilisme merupakan praktik sekaligus teori ekonomi yang dilakukan bangsa Eropa jaman kerajaan. Kerajaan melakukan pengumpulan komoditas-komoditas yang laku di pasar global dari tanah-tanah koloninya. Produk tersebut misalnya kopi, gula, dan lain-lain. Buruh di lokasi kolonial diberikan upah yang kecil seperti halnya kerja rodi di Indonesia. Kemudian, komoditas itu dikirim ke kerajaan sentral misalnya Belanda untuk kemudian dijual ke pasar global. Kerajaan pun memperoleh untung besar dengan modal yang minim. Keuntungan itu distandarisasi dengan emas. Sehingga kejayaan merkantilisme adalah kejayaan

kerajaan. Portugis, Spanyol, dan Belanda pun bersaing bahkan berperang untuk praktik merkantilisme. Tabel di bawah ini Tabel 1. Praktik Teori Merkantilisme

No	Praktik	Teori
1	Ekspor	Merah
2	Impor	Merah
3	Ekspor	Merah
4	Impor	Merah
5	Ekspor	Merah

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaku praktik merkantilisme yaitu kerajaan-kerajaan Eropa, sebagai contoh Inggris. Inggris menjajah India sebagai wilayah kolonial untuk memproduksi komoditas Tabel 2. Keunggulan dan Kelemahan Merkantilisme

No	Keunggulan	Kelemahan
1	Keunggulan	Kelemahan
2	Keunggulan	Kelemahan
3	Keunggulan	Kelemahan
4	Keunggulan	Kelemahan
5	Keunggulan	Kelemahan

Merkantilisme mempunyai prinsip bahwa produk yang dihasilkan oleh wilayah jajahan adalah alat kesejahteraan yang terbatas sehingga bisa ditukar dengan emas perak di pasar global (Arora, 2020). Keunggulannya yaitu proses merkantilisme mendapatkan standar ekonomi emas dan perak lewat ekspor yang dilakukan negara penjajah sehingga kerajaan pusat menjadi sejahtera. Kelemahan merkantilisme

menunjukkan beberapa hal terkait praktik merkantilisme.

yang dibutuhkan oleh pasar global, seperti bahan katun. India menjadi wilayah kolonial sebagai produsen (Arora, 2020), pekerjanya berasal dari penduduk pribumi. Target merkantilisme yaitu memperkuat ekspor untuk mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Ekspor yang besar dari suatu negara kerajaan mencerminkan kesejahteraan negara yang besar pula. Merkantilisme mempunyai teori inti yaitu suatu kerajaan dapat mencapai kekayaan unggul hanya melalui ekspansi terhadap bangsa lainnya (Arora, 2020).

menciptakan penduduk wilayah kolonial merana dan miskin, melakukan ekspor tanpa mendapatkan kesejahteraan, dan mereka dianggap terbelakang bahkan hanya sebagai budak atau sapi perahan. Keunggulan bagi merkantilisme bahwa pemerintahan kerajaan penjajah menjadi absolut, sedangkan wilayah jajahan sebagai tenaga administrasi untuk memenuhi perintah pusat untuk produksi besar-besaran. Keunggulan yang menyentuh pada wilayah jajahan yang terasa mereka mendapatkan hubungan internasional dengan penjajah. Kelemahan pada hubungan internasional antar penjajah yaitu persaingan bahkan sampai terjadi peperangan (Widodo, 2006).

Sebagai kritik merkantilisme muncul gerakan liberalisme. Liberalisme yaitu sebuah gerakan di Eropa yang diawali di Perancis masa Renaissance tahun 1789. Liberalisme berkembang dan mulai diterima banyak pihak era pertengahan abad kesembilan belas. Liberalisme menjadi teori ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu-individu melakukan aktivitas ekonomi dan memperoleh kekayaan. Prinsip liberalisme

Tabel 3. Praktik Teori Liberalisme

1.	Kebebasan	Kebebasan individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan memperoleh kekayaan.
2.	Kebebasan	Kebebasan individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan memperoleh kekayaan.
3.	Kebebasan	Kebebasan individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan memperoleh kekayaan.
4.	Kebebasan	Kebebasan individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan memperoleh kekayaan.
5.	Kebebasan	Kebebasan individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan memperoleh kekayaan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pelaku ekonomi dalam teori liberalisme yaitu individu-individu. Rakyat sebagai individu bisa berusaha secara sendiri atau berkelompok. Tidak ada halangan bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan bisnis ekonomi (Aida, 2005). Pekerja pada organisasi ekonomi dalam

Ekonomi dalam teori liberalisme mempunyai kesamaan dengan merkantilisme, yaitu bertarget pada pasar. Bedanya liberalisme mempromosikan operasi pasar bebas. Pasar bisa terbentuk di dalam negeri dan luar negeri. Pasar dalam negeri merupakan konsekuensi kebebasan terhadap individu. Liberalisme

yaitu kebebasan, persamaan hak di muka hukum, dan bebas bersuara. Dengan demikian, kekuasaan raja yang absolut pun berkurang dan hak-hak istimewa kaum ningrat dilucuti (Widodo, 2006). Masyarakat menjadi liberalis dengan keadaan pasar yang bebas, kebebasan beragama, kebebasan media, dan lainnya. Beberapa hal terkait praktik liberalisme seperti di bawah ini:

konsep liberalisme merupakan individu-individu dalam kesepakatan kontrak (Aida, 2005). Mereka sebagai pegawai suatu organisasi ekonomi. Kontrak merupakan wilayah pemberian legalitas dari pemerintah agar wilayah privat dapat bekerja (Sukri, 2021). Kontrak antar individu juga didukung dengan kontrak berupa regulasi dari pemerintah sebagai fasilitator, menurut Rosseau maupun pemerintah sebagai wasit menurut John Lock (Aida, 2005).

menganggap keberhasilan individu sebagai faktor pendukung kesejahteraan masyarakat universal (Widodo, 2017). Liberalisme mempunyai target pada pasar atau perdagangan bebas. Pasar mempunyai skala ekonomi tersendiri karenanya harus didukung oleh pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari pembagian kerja

(Widodo, 2017). Pembagian kerja maksudnya semua pendapatan yang diperoleh para pekerja dan pengusaha selama mereka melakukan aktifitas ekonomi. Para pekerja dan pengusaha mempunyai andil dalam melakukan produksi, konsumsi, dan distribusi. Komoditas dalam usaha di ranah produksi, distribusi, dan konsumsi yang menghasilkan keuntungan bisa berupa produk atau jasa. Kegiatan ekonomi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kegiatan ekonomi harus difasilitasi dan sedikit diberikan intervensi oleh pemerintah dan harus bersifat *laissez-faire* atau tangan tak terlihat melalui regulasi atau undang-undang (Widodo, 2017).

Tabel 4. Kelebihan dan Kekurangan Liberalisme

Kelebihan	Kekurangan
1. Kebebasan individu	Kebebasan individu
2. Demokratis	Kebebasan individu
3. Demokratis	Kebebasan individu
4. Demokratis	Kebebasan individu
5. Demokratis	Kebebasan individu

Dalam tabel 4 dapat diketahui bahwa kelebihan teori ekonomi liberalisme menunjukkan adanya kebebasan individu. Kebebasan individu harus dijamin agar ekonomi pasar bisa berjalan lepas dari penguasaan kerajaan atau borjuis. Oleh karena itu, pemerintahan kerajaan diganti dengan pemerintahan demokratis. Bentuk negara yang ideal adalah republik, namun ada yang campuran bentuk negara monarki

Menurut Jackson dan Sorensen bahwa liberalisme ada tiga asumsi dasar, yaitu (1) sifat manusia itu positif, (2) hubungan internasional atau market bersifat kerjasama, dan (3) percaya kemajuan (Sudagung dkk, 2015). Persamaan dengan merkantilisme dengan liberalisme yaitu liberalisme sama-sama menghendaki kekayaan dengan mekanisme pasar. Bedanya lokasi kekayaan pada merkantilisme ada pada komunitas kerajaan, sedangkan kekayaan pada liberalisme ada pada setiap individu. Dari situ dapat kita lihat kelebihan liberalisme dibandingkan merkantilisme seperti berikut:

dengan bentuk pemerintahan parlementer. Republik atau parlementer adalah praktik dari prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi ekonomi liberal. Pemerintah mempunyai peran fasilitator pasar dan bersikap netral. Kontrol pemerintah sebagai wakil negara berbentuk konstitusi atau regulasi. Kelemahan teori ekonomi liberalisme yaitu kebebasan individu bersifat atomistik atau transenden. Atomistik berarti sikap kebebasan individu yang merasa dirinya serba mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga terkesan anti sosial. Transenden berarti sikap individu liberalis yang

tercerabut dari akar kebudayaan dan agamanya (Aida, 2005).

Liberalisme dan merkantilisme merupakan dua teori ekonomi yang telah diketahui oleh Mohammad Hatta. Gerakan liberalisme di Belanda masuk setelah adanya *Renaissance* di Perancis. Sekitar pasca tahun 1848, liberalisme menggema di Belanda. Kaum pendukung liberalisme menang di Belanda. Partai liberalisme mempunyai wakil yang kuat di parlemen. Hal ini berpengaruh kepada berakhirnya politik tanam paksa oleh Belanda kepada Indonesia (Andani, dkk, 2023). Tahun 1902 mulai berjalannya politik etis dari pemerintah Wilhelmina Belanda kepada Indonesia. Salah satu program politik etis yaitu pendidikan kepada kaum pribumi. Politik etis Belanda dipelopori pengusaha ekonomi yang memiliki perusahaan media massa bernama, "*De Locomotief*". Ia adalah Pieter Brooshooft yang didukung oleh anggota parlemen atau politis bernama C. Th. Van Deventer (Id.wikipedia.org 2024). Oleh karena itu, Mohammad Hatta pun terimbas memperoleh pendidikan lewat era politik etis.

Mohammad Hatta mengalami fase memahami merkantilisme dan liberalisme di Belanda. Walau merkantilisme sudah dikalahkan liberalisme di Belanda, namun tidak serta merta hilang karena strukturnya masih ada dengan revisi .Kerajaan Belanda

yang dulu melakukan merkantilisme melakukan revisi sistem pemerintahannya tanpa menghilangnya struktur kerajaannya. Revisi itu berupa masuknya teori dan paham liberalisme, sehingga muncul kebebasan berpendapat pada klas *civil society*. Pers pun menjadi bebas bersuara, sehingga dengan liberalisme ini muncul usulan politik etis atau balas budi kepada negara jajahan Hindia Timur atau nusantara. Kebebasan media dan adanya perwakilan rakyat merupakan prinsip pelaksanaan liberalisme. Pada masa Mohammad Hatta di Belanda telah berjalan dua teori ekonomi yaitu merkantilisme (teori ekonomi lama) dan liberalisme (teori ekonomi modern).

Di lain pihak kritik terhadap merkantilisme juga muncul dari marxisme. Marxisme yaitu teori ekonomi yang digagas oleh Karl Marx sebagai refleksi dan kritik terhadap perilaku kapitalisme yang memberikan dampak negative terhadap kelas proletar oleh kelas borjuis (Afifuddin, 2015). Pada sisi lain, untuk melepaskan dari merkantilisme, marxisme juga memberlakukan teori ekonomi. Teori ekonomi marxisme berawal dari teori-teori Karl Marx terkait ekonomi, politik, dan social yang disebut sebagai teori klas. Karl Marx lahir di Jerman pada tanggal 5 Mei

1818 (en.wikipedia.org 2024). Ia lahir sesudah era *Renaissance* di atas tahun 1789, sebuah tahun yang telah berhasil menumbangkan monarki merkantilisme. Karl Marx lahir sesudah liberalisme diterima oleh banyak negara di Eropa. *Renaissance* melahirkan liberalisme. Liberalisme melahirkan kapitalisme. Kapitalisme merupakan paham ekonomi politik yang memberikan kepada kebebasan pasar untuk menguasai faktor-faktor produksi dengan menekan kaum proletar.

Karl Marx mengeluarkan buku *Das Kapital* pada tahun 1867. Buku ini sebagai gerakan rasional untuk menentang kapitalisme yang sudah dianggapnya merajalela. Namun Karl Marx belum paham bahwa kapitalisme, atau liberalisme, Adapun Praktik teori ekonomi marxisme dapat diikuti pada table 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Praktik Teori Marxisme

No	Praktik	Teori
1
2
3
4
5
6
7

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa negara menjadi pelaku utama penengah dan penyelesai perjuangan kelas antara proletary dan borjuis. Negara memegang otoritas tertinggi pelaku ekonomi ,sehingga

lahir sebagai langkah menghapuskan merkantilisme. Karl Marx melihat para pengusaha liberalisme yang mempunyai kekayaan telah berperan mirip para raja. Mereka disebut kaum borjuis. Oleh karena itu, Karl Marx menentang wacana kapitalisme, termasuk liberalisme. Pada dasarnya Karl Marx mempunyai misi yang sama dengan teori liberalisme, yaitu menghapuskan penindasan. Kalau liberalisme menghalau penindasan para raja atas nama merkantilisme, maka Karl Marx menentang dan menghalau penindasan para individu yang menjadi kaya dan menjadi kapitalis. Penulis juga menganggap, bahwa Marxisme menentang merkantilisme karena dianggap sebagai borjuis klasik.

masyarakat menjadi tanpa klas. Negara menjadi instrument peraturan antar klas dan mengatur keberadaan klas borjuis dan mengutamakan klas proletary. Masyarakat tanpa klas yaitu menyeimbangkan setiap kelompok masyarakat, yang tinggi diturunkan yang klas rendah dinaikkan sehingga sejajar. Dalam hubungan antar klas, mereka yang berposisi sebagai pekerja yaitu klas proletar. Klas proletar bekerja pada unit usaha kaum borjuis dengan mengharapkan upah. Oleh karena itu, negara harus berada pada posisi yang membela klas proletar.

Komoditas yang diakui oleh teori Marxisme yaitu berdasarkan *using* atau penggunaan dan *value* atau nilai. *Using* dan *value* merupakan dua alat yang mampu memuaskan kebutuhan manusia. *Using* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan. *Value* yaitu sejumlah jerih payah pekerja sosial untuk menghasilkan/memproduksi sesuatu. *Value* menjadi amat penting dalam kegiatan pasar karena bisa mendapatkan keuntungan. *Value* dari suatu komoditas mempunyai kegunaan atau nilai guna. Semakin tinggi kegunaan atau *using*, maka semakin tinggi *value* komoditas. Lokasi produksi komoditas yang mempunyai *value* dan *using* berada di tempat kaum borjuis

Tabel 6. Keunggulan dan Kelemahan Marxisme

Dari tabel 6 diketahui bahwa marxisme mempunyai beberapa kelebihan, antara lain : *equality*, pengorganisasian sosial untuk mengolah sumber daya alam, pengurangan hutang, dan perlindungan hak pekerja. *Equality* atau persamaan kelas yaitu setiap individu harus mempunyai kesetaraan status, terutama status ekonomi. Pembagian atau pemerataan keuntungan

berproduksi (Wijaya dkk, 2017). Lokasi produksi lainnya yang ideal menurut teori ekonomi marxisme yaitu pada area yang dikehendaki negara, bahwa negara sebagai pelaku utama ekonomi dan meniadakan dominasi borjuis dalam tatananan sosial dan ekonomi negara (Wijaya dkk, 2017). Komoditas yang dihasilkan oleh kaum proletar atau kaum pekerja atau kaum buruh dijual olehnya kepada kaum borjuis untuk mendapatkan upah. Komoditas yang dihasilkan kaum buruh lalu dijual ke pasar untuk memperoleh keuntungan .

Marxisme mempunyai berbagai keunggulan juga ada kelemahannya. Di bawah ini penulis sampaikan beberapa keunggulan dan kelemahannya.

ekonomi harus dilakukan. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh kapitalisme atau liberalisme. Keuntungan lainnya yaitu pengorganisasian sosial untuk mengolah sumber daya alam. Sumber daya atau *resources* adalah factor produksi yang penting untuk dikerjakan oleh masyarakat. *Resources* harus dikelola oleh organisasi sosial atau LSM. Hal ini agar *resources*

tidak dimonopoli oleh kaum kapitalis. Pengurangan hutang juga menjadi keunggulan teori ekonomi marxisme. Hal ini dikarenakan, bahwa hutang akan membebani kerja karena adanya unsur bunga dan denda. Oleh karena itu, hutang harus diganti dengan pemerataan distribusi sumber daya, baik oleh organisasi sosial maupun oleh negara. Teori ekonomi marxisme mengharuskan negara memberikan proteksi atau perlindungan terhadap kaum pekerja. Perlindungan berupa pemberian hak dan kesejahteraan bagi pekerja, dan diberikan kemampuan membentuk asosiasi untuk mengontrol dan membela hak-hak pekerja (Mishra 2020).

Kelemahan marxisme yaitu, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi tidak diberlakukan mekanisme penentuan harga dan cara agar rakyat bisa mempunyai hak kepemilikan terhadap suatu komoditas dan sumber daya alam. Hal ini akan berdampak pada ketidakefisiensinya distribusi sumber daya alam dan distribusi hasil produksi. Masalah selanjutnya yaitu, teori ekonomi marxisme tidak memberlakukan adanya insentif kepada seseorang yang berhasil bekerja keras dan menemukan inovasi. Padahal banyak individu yang pintar dan mempunyai motivasi entrepreneur untuk bekerja mengambil resiko. Ketidakhadiran insentif ini berdampak kepada tidak adanya pengakuan terhadap prestasi individu.

Ketiadaan pengakuan prestasi dan usaha inovatif ini dilakukan negara karena sifatnya yang sentralistik. Semua kegiatan harus di atas namakan negara. Akibatnya prestasi dan inovasi individu menjadi atas nama negara. S Kelahirannya bersamaan dengan masa awal penerapan politik etis yang ditetapkan oleh Ratu Wilhelmina di Belanda semua perjuangan kelas dihentikan dengan penempatan semua dominasi kepada kekuasaan negara. Kaum borjuis kekuasaannya dipindah kepada negara sehingga tidak ada pertentangan antar kelas. Kekuasaan negara yang sentralistik menyebabkan dampak negative lainnya, yaitu tidak adanya pengakuan kebebasan individu dan hak asasi individu sebagai manusia sering tidak diakui dengan alasan pengabdian kepada negara (Bahtiyar, 2015).

Marxisme berkehendak agar penguasa, baik kerajaan (merkantilisme/kapitalis klasik) dan individu penguasa yang bersifat borjuis (kapitalis), melepaskan kekuasaannya dan diberikan kepada kaum proletar. Rakyat menjadi tidak kesusahan dan tidak terjadi persaingan kelas yang terus berkonflik. Marxisme memandang bahwa kegiatan ekonomi harus diserahkan kekuasaannya kepada negara dan untuk kemakmuran rakyat. Marxisme mempunyai kesamaan dengan liberalisme yaitu melucuti

kekuasaan kerajaan dan diserahkan kepada kekuasaan rakyat. Bedanya, marxisme menggunakan formalitas negara untuk mengatur kegiatan ekonomi sedangkan liberalisme pada tangan kebebasan individu.

Aliran marxisme masuk ke organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda pada saat Mohammad Hatta menjadi ketua. Eranya sekitar tahun 1926 sampai dengan 1930. Hal ini ditunjukkan dengan intensnya komunikasi Mohammad Hatta dengan Semaun. Semaun menjadi perwakilan persatuan marxisme Eropa di Hindia Timur. Mohammad Hatta tidak mengikuti aliran marxisme yang dibuktikannya beliau lebih memilih menyelesaikan studinya daripada melanjutkan Perhimpunan Indonesia yang lebih cenderung kepada Marxisme.

Ketiga teori ekonomi yang dipelajari Mohammad Hatta mempunyai dampak politik ekonomi, yaitu pertentangan satu dengan lainnya. Ketiga teori tersebut belum cocok dengan model negara bekas jajahan Eropa, padahal ketiga teori tersebut merupakan produk dari para penjajah. Mohammad Hatta tidak ingin masuk dalam pusaran pertentangan ketiga teori dan implementasinya. Setelah pulang dari Belanda, Mohammad Hatta menunjukkan sikap moderatnya bahkan dipandang sebagai sikap menjadi jalan tengah tiga teori besar, merkantilisme, liberalisme, dan

marxisme. Adapun jalan tengah tersebut nampak pada tulisan-tulisan beliau pada majalah Daulat Ra'jat. Daulat Ra'jat yaitu majalah yang dipimpin oleh Mohammad Hatta, terbit tahun 1931. Terkait dengan ekonomi kerakyatan diterangkan dalam artikel berjudul, "Ekonomi Ra'jat Dalam Bahaya" pada halaman 2-4 tanggal 10 Januari 1934 Daulat Ra'jat Nomor 84. Artikel tersebut menyebutkan bahwa ekonomi ra'jat Indonesia dalam kesulitan. Rakyat mengalami kesulitan ekonomi, penghasilan kurang, tabungan menipis, dan tidak punya pekerjaan alias pengangguran. Pribumi yang menganggur ada yang mengandalkan belas kasihan dari rakyat lainnya yang kebetulan mempunyai harta. Pengangguran yang berkulit putih (orang Eropa) selalu dapat santunan dari pemerintah Hindia Belanda.

Banyaknya orang menganggur di kalangan rakyat pribumi mendorong Mohammad Hatta untuk mengutarakan realitas sosial tersebut lewat artikel berita agar orang lain yang mampu dapat membantu rakyat yang kesusahan. Rakyat yang menganggur ada yang kemudian melakukan urbanisasi untuk menjadi buruh atau jualan seadanya. Ini pun tidak juga mengangkat ekonomi rakyat. Mohammad Hatta mengutarakan bahwa agar rakyat sejahtera haruslah diberikan politik kemakmuran bertujuan. Misalnya,

transmigrasi, proyek padat karya, menciptakan produksi baru, dan meningkatkan produksi yang ada. Namun hal ini tak dapat dilakukan jika rakyat Indonesia belum merdeka (Hatta, 1934).

Rakyat Indonesia, jika sudah merdeka, harus masuk dalam persekutuan atau koperasi. Koperasi merupakan politik kemakmuran dengan tujuan kemakmuran rakyat yang terbentuk atas kerjasama rakyat dengan negara yang azasnya kebangsaan dan kerakyatan. Hal ini menjadi ekonomi kerakyatan. Azas kebangsaan yaitu merasa bersaudara dan sama sebagai manusia. Azas kerakyatan yaitu untuk mengurus penghidupan rakyat bersama rakyat. Hal ini tertuang dalam Daulat Ra'jat tanggal 10 September 1931 artikel berjudul, "Kata Pendahoeloean Buat Daulat Ra'jat" dan artikel berjudul, "Makloemat Pada Mendirikan Club Pendidikan Nasional Indonesia". Ekonomi kerakyatan harus menggunakan lembaga persekutuan bentuknya koperasi. Koperasi yaitu wujud ekonomi kerakyatan karena mengutamakan penghidupan rakyat yang berbasis ekonomi untuk kesejahteraan, politik untuk menentukan arah petunjuk bagi pemerintah dan rakyat duduk bersama menentukan praktik pemakmuran rakyat, dan sosial melalui penggabungan banyak individu rakyat dalam persekutuan koperasi (Hatta, 1931).

Kegiatan ekonomi kerakyatan koperasi ini berbeda dengan liberalisme yang mengutamakan kesejahteraan bagi individu dan pasar. Ekonomi kerakyatan ini juga berbeda dengan ekonomi marxisme yang mensejahterakan negara. Ekonomi kerakyatan juga berbeda dengan ekonomi merkantilisme yang mengutamakan kesejahteraan raja dan keluarga raja. Liberalisme dan Marxisme yang digadagadag menjadi solusi pensejahteraan rakyat di Eropa belum tentu sukses karena rakyat dihargai lewat politik saja dan tidak dihargai secara ekonomi. Ekonomi kerakyatan menjadi jalan tengah praktik politik pemakmuran rakyat di antara ekonomi liberalisme dan marxisme serta merkantilisme. Liberalisme, merkantilisme, dan marxisme menurut Mohammad Hatta berasal dari Eropa yang tentu saja tidak cocok dengan politik pemakmuran rakyat di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kebangsaan Indonesia dan kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan mempunyai kreatifitas tersendiri karena merujuk peningkatan produksi yang ada dan menciptakan produksi yang baru. Intinya untuk mengurus penghidupan rakyat di Indonesia harus lewat cara Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menjadi jalan tengah antara merkantilisme

dan marxisme yaitu bahwa negara mempunyai kedaulatan untuk melakukan pemerintahan dan melakukan fungsi distribusi dan proteksi. Jalan tengah merkantilisme dan liberalisme yaitu berlakunya pasar dengan format mengutamakan kekeluargaan.

Lalu, jalan tengah liberalisme dan marxisme yaitu membentuk negara bangsa. Jalan tengah ketiga teori ekonomi dalam perspektif Mohammad Hatta yaitu negara bangsa yang berdaulat dengan tujuan memerdekakan rakyat (*freedom*) dan mensejahterakan rakyat. Rakyat bebas berusaha dengan sistem kekeluargaan dalam suatu format usaha kerjasama yang difasilitasi dan dilindungi oleh negara.

Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan politik pemakmuran rakyat. Mohammad Hatta mempunyai cita-cita agar rakyat Indonesia bisa sejahtera. Cara paling utama menurutnya harus merdeka dari penjajahan. Ekonomi kerakyatan menjadi gerakan nasionalisme di bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Kalau rakyat Indonesia belum merdeka, maka gerakan nasional tidak bisa memakmurkan rakyat dan rakyat tidak bisa mencapai kesejahteraan. Perjuangan kemerdekaan

Usaha kerjasama dilakukan sesuai dengan kapasitas daerah masing-masing. Muncul teori ekonomi kerakyatan dalam praktek koperasi yang berazaskan kekeluargaan. Tulisan “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja”, “Makloemat”, dan “Kata Pendahoeoelan untuk Daulat Ra’jat” juga diperkuat oleh tulisan berjudul, “Pengaroeoh Koloniaal Capitaal di Indonesia”. Tulisan ini diterbitkan oleh Daulat Ra’jat pada tanggal 20 November 1931 Tahun I Nomor 7 halaman 1-4. Sikap jalan tengah terhadap tiga teori besar di atas nampak pada pernyataan bersifat kolaboratif, yaitu “demokrasi tidak lengkap apabila tidak berlaku kedua-dua seginya, demokrasi politik dan ekonomi” (Maryono 2015).

merupakan perjuangan yang bervisi menghapuskan penjajahan di atas dunia. Rakyat Indonesia susah dengan penjajahan Belanda. Rakyat di luar Indonesia yang dijajah oleh bangsa lain pasti juga susah. Misalnya rakyat Palestina mengalami kesusahan berkepanjangan akibat penjajahan bangsa Israel begitu pula dengan rakyat India saat dijajah Inggris juga mengalami kesusahan.

Gerakan menghapus penjajahan sama dengan gerakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan

tersebut termaktub dasar negara. Pancasila ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kaidah, arah, dan haluan perekonomian rakyat Indonesia harus diputuskan berdasarkan arah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gerakan ekonomi ini disebut sebagai ekonomi Pancasila. Melalui ekonomi Pancasila, Mohammad Hatta membuktikan bahwa ekonomi kerakyatan bukan sekedar kegiatan ekonomi tetapi juga kegiatan politik melalui model rekonstitusi. Rekonstitusi yaitu gerakan politik mendukung ekonomi kerakayatan berbasis Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Agusalim , 2021).

Ekonomi kerakyatan dipopulerkan oleh Mohammad Hatta untuk mewujudkan kemulyaan rakyat. Dalam ide Muhammad Hatta seakan bertanya, “bagaimana menjadikan rakyat Indonesia sejahtera?” Ekonomi kerakyatan berada dalam ideologi ekonomi Pancasila. Adanya dukungan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menjadi langkah perlindungan dari negara terhadap ekonomi rakyat.

Hal tersebut dilakukan oleh Mohammad Hatta karena beliau dari tokoh ilmuwan ekonomi kemudian menjadi aktor

politik. Maksudnya sebagai ilmuwan ekonomi menerapkan ekonomi kerakyatan sebagai aktor politik ekonomi kerakyatan dimasukkan dalam naskah Undang-Undang Dasar untuk memberikan aspek perlindungan dan keberlanjutan ekonomi kerakyatan. Sehingga dalam kondisi apapun ekonomi kerakyatan akan tetap berjalan. Wujud ekonomi kerakyatan yaitu koperasi. Koperasi bisa berada di desa atau kota. Koperasi merupakan gabungan para pelaku usaha yang mempunyai kesamaan visi dan misi. Kesamaan visi dan misi bisa berdasarkan persamaan profesi, kesamaan etnis, kesamaan lingkungan, kesamaan latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, koperasi menjadi bentuk nyata ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan yang dilindungi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 merupakan implementasi dua fungsi pemerintahan yaitu fungsi perlindungan dari konstitusi sekaligus fungsi pemberdayaan dan distribusi dari pemerintah. Fungsi perlindungan terhadap ekonomi kerakyatan merupakan gerakan politik Mohammad Hatta sebagai aktor politik yang menjabat sebagai wakil presiden. Pengembangan konsep ekonomi kerakyatan digerakkan sampai ke ranah politik lewat konstitusi negara dan turunannya dalam regulasi pemerintahan

terkait koperasi saat Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden RI (1945-1947), menjadi Perdana Menteri (1948-1950), dan menjadi Wakil Presiden lagi (1951-1956). Implementasi koperasi didukung rakyat dengan munculnya banyak asosiasi koperasi seperti dalam Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia Ke-II (15-17 Juli 1953) yang dihadiri 206 utusan mewakili 83 pusat-pusat koperasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Ekonomi kerakyatan menjadi ekonomi Pancasila juga karena membawa nafas konstitusi juga nafas Sila Ke-5 Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Teori ekonomi Mohammad Hatta dalam ekonomi kerakyatan masuk pula sebagai ekonomi Pancasila. Kehidupan sosialnya menginternalisasi praktek ekonomi dan ide-ide ekonomi kesukuan berbasis *gemenschaften* atau komunitas. Komunitasnya sangat memegang ideologi (nilai dan ide adat) yang guyub dan mayorat. Contoh mayorat adalah tanah dimiliki oleh trah keluarga dari suku Minangkabau setempat sehingga (umumnya) kepemilikan tanah di area suku Minangkabau sulit berpindah ke suku lain. Dari model trah keluarga itulah kemudian bersama latar belakang pendidikannya pemulyaan rakyat melalui sistem

pemberdayaan masyarakat berbentuk koperasi.

Prinsip teori ekonomi kerakyatan yaitu: kebersamaan, kekeluargaan, dan bertujuan kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan gerakan ekonomi menyatukan aspek antropologis komunal dan aspek politik rakyat Indonesia untuk membentuk usaha bersama berbasis kekeluargaan bertujuan untuk kemakmuran bersama. Teknisnya dari *co* = bersama dan *operation*=berusaha yaitu usaha bersama (koperasi). Dengan demikian rakyat bisa menjadi *full citizen* atau warga negara yang sejahtera bukan warga negara yang hanya menerima kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah.

Lewat ekonomi kerakyatan yang dilindungi oleh ekonomi Pancasila, maka negara menjadi susunan masyarakat yang integral. Segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Mohammad Hatta memilih negara kesatuan bersendi terhadap demokrasi yang dibatasi konstitusi dan demokrasi rakyat.

Kekuasaan terbesar di tangan rakyat, maka rakyat dapat menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi. Demokrasi rakyat membangun masyarakat baru berdasar pada gotong royong. Tujuan demokrasi untuk memperbarui masyarakat, tetapi jangan memberi kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara (Soeprapto, 2013).

Koperasi Implementasi Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Pancasila

Untuk mengimplementasikan ekonomi kerakyatan dibuatlah kelembagaan berbentuk koperasi. Pada masa Mohammad Hatta asosiasi koperasi telah melakukan kongres pada tanggal 15-17 Juli 1953. Koperasi menjadi soko guru ekonomi kerakyatan. Alasan koperasi menjadi implementasi ekonomi kerakyatan yaitu proses pembentukannya merupakan transformasi orang yang berada di desa atau kota untuk membentuk kumpulan kerjasama dan bersatu berdasarkan kesamaan pekerjaan atau tujuannya. Kerjasama ini kemudian mengusahakan kegiatan yang bisa dijual ke pasar atau untuk memenuhi yang dibutuhkan pasar, sehingga keuntungan koperasi bisa untuk kesejahteraan rakyat. Koperasi menjadi cerminan terbentuknya *civil society*. Koperasi menjadi bagian *civil society* karena adanya unsur *governance*

(tata pemerintahan) yang disatukan berdasarkan kesamaan identitas diri, kesamaan hubungan dan komunikasi yang terikat nilai yang sama. Koperasi, sebagai *civil society*, menjadi bagian pilar *governance* yang mendampingi pemerintah dan unsur market. Market dimanfaatkan koperasi untuk menjual produk dan usaha koperasi. Pemerintah memberikan regulasi dari atas sampai ke bawah untuk melindungi koperasi (Sugiyanto et al. 2018).

Sejarah mencatat bahwa, Mohammad Hatta pernah membangun sebuah koperasi di Banda Neira sekitar tahun 1930an. Mohammad Hatta dibantu Sutan Sjahrir dan Iwa Kusuma S membangun koperasi. Koperasi berada di bawah organisasi Perkumpulan Banda Moeda (Perbamoe). Koperasi diketuai oleh Mohammad Hatta. Koperasi ini menjadi salah satu contoh karya beliau, bahwa organisasi koperasi merupakan kegiatan urundaya atau patungan rakyat untuk kesejahteraan rakyat (Pamungkas 2020). Ada kalimat menarik dari Mohammad Hatta saat di Banda Neira (Pamungkas 2020),

“kita akan memonopolit semua hasil bumi yang turun dari perahu kemudian didistribusikan pada masyarakat setempat.”

Idealnya koperasi yaitu sebuah lembaga persekutuan yang bergerak di

bidang ekonomi, politik, dan sosial. Koperasi mempunyai program untuk mengurus kehidupan rakyat dalam bidang ekonomi. Para anggota koperasi ikut bersama pemerintah menentukan arah ekonomi kerakyatan dalam bidang politik. Keputusan mufakat adalah model pengambilan keputusan antara pemerintah dengan rakyat yang bernaung dalam koperasi. Individu-individu rakyat dapat bergabung untuk bersumbang daya membentuk koperasi demi kesejahteraan bersama. Koperasi menjadi Lembaga pelaksana ekonomi kerakyatan sekaligus alat mempertemukan pemerintah dengan rakyat. Urusan rakyat Indonesia diurus sendiri oleh rakyat Indonesia. Istilah koperasi ada dalam tulisan Mohammad Hatta dalam Daulat Ra'jat tertanggal 10 September 1931 halaman 5 (Hatta 1931).

Koperasi secara kelembagaan mempunyai landasan ekonomi Pancasila karena dilindungi dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koperasi mempunyai nafas sesuai ayat 1 pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi menjadi bagian *civil society* dalam sistem *good governance*. Koperasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan melakukan mekanisme perubahan sosial ke arah yang lebih maju dengan kecepatan yang

diharapkan khususnya menyesuaikan diri atas pola sosial, budaya, dan politiknya dalam perkembangan informasi dan globalisasi. Koperasi terbentuk oleh basis kultural masyarakat untuk membentuk kelembagaan secara politis yang mempunyai tujuan bersama untuk mendapatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat jalinan interaksi sosial. Sehingga koperasi menjadi kelembagaan ekonomi yang fungsi bekerjanya meliputi aspek budaya, politik, dan sosial (Sugiyanto dkk. 2018).

Menurut Mohammad Hatta, koperasi menjadi bagian *civil society* karena mentransformasikan rakyat menjadi warga negara. Masyarakat yang mempunyai negara karena bisa mendayagunakan budaya dan sumber daya alamnya. Kultur menjadi sivilisasi jika sumber daya materiil rakyat bisa didayagunakan untuk kesempurnaan keluarga anggota koperasi. Juga, kultur menjadi beradab jika berdasarkan religi dan nilai sosial (Fuady, 2019). Koperasi menjadi pemersatu aktor-aktor desa dan kota. Sehingga anggota koperasi menjadi agen kohesi sosial karena adanya tujuan bersama yang diperjuangkan untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial bisa diraih ketika sumber-sumber daya daerah dan kulturalnya bisa menjadi produk/jasa koperasi yang bisa dijual ke pasar (Sofyan 2020).

Dengan adanya koperasi bisa menjadi contoh riil evolusi manusia menuju negara. Manusia-manusia menyatu secara privat dalam keluarga lalu keluarga membentuk pemerintahan sendiri di desa, desa-desa membentuk negara. Dengan evolusi ini menunjukkan adanya evolusi kepaduan sosial (kohesi) dari keluarga kepada negara. Proses kohesi sosial ini bisa berjalan dalam koperasi. Koperasi memberikan keleluasaan kepada masing-masing rakyat untuk berpendapat atas kebutuhannya sehingga terbentuk kesepakatan mufakat untuk mencapai kesejahteraan Bersama. (Putra, 2022). Koperasi yang ideal pantas untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat bisa sejahtera bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga sejahtera di bidang politik dan sosial. Koperasi yang ideal menurut Mohammad Hatta adalah koperasi yang mempunyai peran politik kemakmuran. Politik kemakmuran yaitu penyatuan bidang ekonomi, sosial, dan politik dalam koperasi. Dalam kesejahteraan politik, pelaku koperasi harus sering duduk bersama dengan pemerintah untuk mengelola ekonomi kerakyatan berupa semua strategi mengurus penghidupan rakyat. Dalam bidang ekonomi, koperasi melakukan berbagai usaha ekonomi yang sesuai dengan kapasitas koperasi dan masing-masing anggotanya sehingga

modal kuat dan pasar lebih jelas targetnya serta keuntungan lebih terjamin. Secara sosial, koperasi menjadi alat pemersatu rakyat.

SIMPULAN

Simpulan yang bisa diangkat dari tulisan ini yaitu bahwa Mohammad Hatta berusaha melakukan gerakan kemerdekaan berbasis rakyat. Merdeka dalam arti kebangsaan dan merdeka dalam arti mengisi kemerdekaan yang sudah diraih. Mohammad Hatta melakukan kemerdekaan bangsa terlebih dahulu dengan mendidik rakyatnya. Rakyat dididik agar tahu karakter aslinya. Watak, iman, dan kepercayaan dibentuk sebagai modal kebangsaan dan kerakyatan.

Rakyat Indonesia yang susah selama masa penjajahan Belanda harus merdeka dan sejahtera ke depannya. Kesejahteraan dapat dicapai lewat politik pemakmuran. Politik pemakmuran yang dimaksud yaitu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan harus melakukan penciptaan produksi baru dan peningkatan produksi yang sudah ada. Ekonomi kerakyatan yaitu gerakan ekonomi berbasis kebangsaan dan kerakyatan melalui kerja sama antar rakyat dan rakyat dengan pemimpin untuk mengurus penghidupan rakyat.

Ekonomi kerakyatan merupakan jalan tengah dari teori ekonomi Marxisme, Liberalisme, dan Merkantilisme. Ekonomi

kerakyatan menjembatani Merkantilisme dan Liberalisme lewat berlakunya pasar dengan format mengutamakan kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan menjembatani Merkantilisme dan Marxisme, bahwa negara mempunyai kedaulatan untuk melakukan pemerintahan dan melakukan fungsi distribusi dan proteksi terhadap individu. Ekonomi kerakyatan menjembatani Liberalism dan Marxisme dengan membentuk negara bangsa.

Ekonomi kerakyatan hanya bisa berjalan lewat kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan. Untuk mengisi kemerdekaan, ekonomi kerakyatan mempunyai sarana memakmurkan rakyat harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan juga disebut sebagai ejawantah ekonomi Pancasila untuk mengisi

kemerdekaan. Ekonomi kerakyatan harus menyatukan unsur ekonomi, sosial, dan politik. Unsur ekonomi yaitu gerakan ekonomi rakyat mengurus penghdiupan rakyat lewat kapasitas para rakyat baik menciptakan produksi baru atau meningkatkan produksi yang sudah ada. Unsur politik yaitu para pelaku ekonomi kerakyatan bersama para pemimpin pemerintahan sering duduk bersama untuk mengarahkan gerakan ekonomi kerakyatan terutama dalam regulasi. Unsur sosial, yaitu bergabungnya rakyat dalam satu lembaga bernama koperasi. Koperasi merupakan wujud persekutuan yang menyatukan rakyat untuk saling bersumbang daya untuk kemakmuran bersama. Koperasi menjadi lembaga ekonomi yang mempersatukan aspek politik dan sosial. Koperasi menjadi gerakan kohesi sosial dari keluarga sampai dengan negara untuk kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2015. Pendidikan Dengan Pendekatan Marxis-Sosialis. *Jurnal Adabiyah* 15(2):189–203.
- Agusalim, Lestari. 2021. *Sistem Ekonomi Pancasila (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aida, Ridha. 2005. Liberalisme Dan Komunitarianisme: Konsep Tentang Individu Dan Komunitas. *Jurnal Demokrasi* IV No. 2:95–106.
- Arora, Sarthak. 2020. Mercantilism and Its Relevance Today *Www.Researchgate.Net* 1–4.
- Bahtiyar, Eko. 2015. Kritik Islam Terhadap Konsep Marxisme. *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16 (2):127–35.
- Aman, 2014. *Indonesia : Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Yogyakarta: Pujangga Press

- Yogyakarta.
en.wikipedia.org. 2024. "Karl Marx."
En.Wikipedia.Org. Retrieved January
10, 2024
(https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx).
- Fuady, Ahmad Syauqi. 2019. Islam Dan Pendidikan: Studi Pemikiran Mohammad Hatta. *At-Tuhfah : Jurnal Keislaman* 7(1):1–11. doi: 10.36840/jurnalstudikeislaman.v8i1.161.
- Hatta, Mohammad. 1931. "Daulat Ra'jat."
Kaum Daulat Ra'jat.
- Hatta, Mohammad. 1934. "Daulat Ra'jat."
Kaum Daulat Ra'jat.
- Id.wikipedia.org. 2024. "Politik Etis."
Id.Wikipedia.Org. Retrieved January
10, 2024
(https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Etis).
- Maryono. 2015. Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulis, Dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* XI(2):24–35.
- Mishra, Ragini. 2020. "Advantages and Disadvantages of Marxism."
Medium.Com. Retrieved
(<https://raginithewriter.medium.com/advantages-and-disadvantages-of-marxism-ee25713a47c>).
- Pamungkas, M. Fazil. 2020. "Bung Hatta Dan Koperasi." Retrieved January 11, 2024
(<https://historia.id/ekonomi/articles/bung-hatta-dan-koperasi-P4n15/page/1>).
- Prihatinah, Tri Lisiani, Malaysia Uthm, Johor Malaysia, Tulus Wahjuono, Istiana Hermawati, Soetji Andari, and Aulia Taswin .2023.Badan Riset, Inovasi Nasional, Indonesia . The Omnibus Law's Conception on the Protection of Female Employee A Study in Indonesian Smes. *Cite: Baltic Journal of Law & Politics* 16(3):2023. doi: 10.2478/bjlp-2023-00000213.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. 13th ed. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Putra, Andri Azis. 2022. How To Create Social Cohesion During Pandemic? A Sociological Analysis Of Digital Voluntarism As The Path Of The Reconstruction Of Religious Consciousness In Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16(2):317–38. doi: 10.14421/jsr.v16i2.2360.
- Rosyda. 2023.n.d. Pengertian Merkantilisme, Sejarah, & Teori Ekonomi. *Gramedia*. Retrieved November 20, 2023
(<https://www.gramedia.com/literasi/merkantilisme/>).

- Soeprapto, Sri. 2013. Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. *Jurnal Filsafat* 23(2):99–116.
- Sofyan, M. Ali. 2020. “Eksistensi Megono Sebagai Identitas Kultural: Sebuah Kajian Antropologi Kuliner Dalam Dinamika Variasi Makanan Global.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15(1):45–62. doi: 10.14421/jsr.v15i1.1751.
- Sudagung, Adityo Darmawan, Arry Bainus, and Abdul Musyawardi Chalid. 2015. “Kerjasama Pembangunan Indonesia Dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme Dalam Hubungan Internasional.” *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik ...* V(1):31–41.
- Sugiyanto , Ardi Surwiyanta, Hermawan Prasetyanto, Musoli Musoli. 2022. “Hotellogy - A New Branch of Philosophy of Science.” *Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT)* 13(2):466–76.
- Sugiyanto, Sugiyanto, Heru Kurnianto Tjahjono, Arief Hartono, and Lathiful Khuluq. 2018. “Comparative Governance of Non-Profit Organization: Case Study of ONL Mardi Wuto and Hamba in Yogyakarta.” *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* 1(2):115–25. doi: 10.23960/ijebe.v1i2.42.
- Sukri, Mhd Alfahjri. 2021. “Kontektualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau Di Indonesia.” *Jurnal Al-Aqidah* 13(1):90–102. doi: 10.15548/ja.v13i1.2754.
- Tri Sela Andani, Muhammad Ridho Saputra, and Yustina Sri Ekwandari. 2023. “Sistem Ekonomi Liberal Pada Masa Kolonial Di Pedesaan.” *Edukasi IPS* 6(2):52–60. doi: 10.21009/eips.006.02.06.
- Utomo, Ilham Nur. 2018. Pendidikan Dalam Pemikiran Mohammad Hatta. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* 3(1):55–67.
- Widodo, Erna S. 2017. Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme Dan Liberalisme *Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha* 1(1):8–9.
- Widodo, Tri. 2006. “From Dutch Mercantilism To Liberalism: Indonesian Historical Perspective.” *Journal of Indonesian Economy and Business* 21(4):323–43.
- Wijaya, Yoseph Fredy, Wahyu Budi Nugroho, and I. Nengah Punia. 2017. “Marxisme Dan Buruh Indonesia Kontemporer: Studi Dimensi Relevansi Dan Inrelevansi Pemikiran Sosial-Ekonomi Karl Marx Pada Buruh Pabrik Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)*

1(1):1–15.
Wikipedia. n.d. “Mohammad Hatta.”
Retrieved November 20, 2023
(<https://id.wikipedia.org/wiki/Moham>

mad_Hatta).
Zed, Mestika. 2023. *Metode Penelitian
Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.